

HK. PERSAINGAN USAHA PENGANTAR (K01)

Dosen:

Prof Dr Jamal Wiwoho, SH., M.Hum.

MATERI POKOK:

- ❑ PENGANTAR
- ❑ SISTEM EKONOMI INDONESIA
- ❑ PANDANGAN HK TENTANG PERSAINGAN USAHA
- ❑ PERSAINGAN SEMPURNA DAN PERSAINGAN TIDAK SEMPURNA
- ❑ KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA (STRUKTUR PASAR DAN BEHAVIOUR)
- ❑ MODEL PENGATURAN (INDONESIA, KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN)
- ❑ KASUS

BAHAN BACAAN UTAMA, antara lain:

- ❑ Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Citra Aditya Bakti, 1999
- ❑ Cameron Markby Hewitt, Bussiness Guide to Competition Law, John Wiley&Son, NY, 1995
- ❑ Charles Mc Manis, Unfair Trade Practices, St Paul Minn West Publishing Co, 1988
- ❑ Donald T. Wilson, International Bussiness Transaction, Sint Paul Minn West Publishing Co, 1980
- ❑ Emmy Pangaribuan, Perusahaan Kelompok dan Hk Persaingan, 1995
- ❑ Insan Budi Maulana, Catatan Singkat UU No 5 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, 2000
- ❑ LP3ES, Pemikiran Pembangunan Bung Hatta, 1995
- ❑ Lembaga Soekarno Hatta, Sejarah Lahirnya UUD,45 dan Pancasila, 1986

IKLIM USAHA (SEBELUM UU NO 5 TH 1999 DAN SEKARANG ?)



- **STRUKTUR DAN PERILAKU PASAR CENDERUNG ANTI KOMPETITIF, HANYA MENGHASILKAN PENGUSAHA BESAR KARENA KEMUDAHAN DAN PERSEKONGKOKOLAN.**
- **INDIKASI: PENGUSAHAAN PASAR OLEH SEGELINTIR PENGUSAHA, PRAKTEK2 MONPOLI, KARTEL MELALUI ASOSIASI BISNIS TTT, PERATURAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YG MEMIHAK, KOLUSI ANTARA BADAN2 PEMERINTAH DGN KALANGAN PENGUSAHA TTT DALAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN PEMERINTAH MELALUI TENDER (BID RIDGING) SECARA SEPIHAK DLL.**

REAKSI ATAS KONDISI TERSEBUT:

□ SECARA
SOSIOLOGIS →
KRITIKAN,
TULISAN, HASIL
PENELITIAN

□ SECARA POLITIS
→ MUNCUL DARI
DESAKAN
INTERNASIONAL
THDP KEBIJAKAN
EKONOMI DAN
PERDAGANGAN
PEMERINTAH.

JANUARI 1998, PEMERINTAH RI MENYEPAKATI RANGKAIAN LETTER OF INTENT BERSAMA IMF

- ❑ DARI 50 BUTIR LOI, SEBAGIAN SCR LANGSUNG MENGAMANATKAN KEBIJAKAN DEREGULASI.
- ❑ DEREGULASI DIREALISASIKAN DALAM BENTUK PENERBITAN 3 PP, 7 KEPPRES, 6 INPRES
- ❑ IMF TURUT MEMBERIKAN INSTRUKSI PENGHENTIAN DISTORSI PASAR YG DILAKUKAN OLEH DAN UNTUK KEPENTINGAN GOL TTT. HASILNYA:
 1. DICABUTNYA KEPPRES 20/1998 YG MEMBERI FASILITAS ISTIMEWA PD PROYEK MOBNAS
 2. KEPPRES 15/1998 YG MEMBERI HAK MONOPOLI KEPADA BULOG KECUALI BERAS
 3. KEPPRES 21/1998 YG MENJADI DASAR BERDIRINYA BPPC

PERAN PEMERINTAH (YG DIHARAPKAN)

- ❑ MENEKAN LAJU INFLASI DAN TERUS MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM, KHUSUSNYA DI SEKTOR PRIVAT.
- ❑ MAMPU MENGHALANGI TERJADINYA PERSEKONGKOLAN DI KALANGAN PELAKU USAHA YG MERAIH KEUNTUNGAN DI PASARAN DENGAN CARA2 YG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PELAKU USAHA LAIN DAN MASYARAKAT UMUM SEBAGAI KONSUMEN.
- ❑ BERBAGAI PERAN ITU KEMUDIAN DICOBA DIAKOMODIR DALAM UU NO 5 TH 1999